

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Pustaka Magister.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.

Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Firman Wijaya, 2002, *Whistleblower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.

Ismansyah, Fitri, dan Henni, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Kompas.

Lilik Mulyadi, 2015, "*Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*", Bandung: PT. Alumni.

Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, Muhammad Kamal. 2019, *Human Traficcking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: Social Politic Genius, Cetakan Pertama.

Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Nawawi, 1997, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Jakarta: CV Fajar Agung.

Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*. PT Sangir Multi Usaha.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.
- Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Ade Adhari, 2017, Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, vol. 1 No. 1.
- Abdul Haris Semendawai, 2016, Penetapan Status *Justice collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3*.
- Abdul Haris Semendawai, 2013, *Eksistensi Justice collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 17 April 2013.
- Ahmad Bardi, 2023, Kewenangan LPSK dalam Penetapan *Justice collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Umum di Indonesia (Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL), *Unizar Law Review*, Vol. 6 Issue 1.
- Alexia Sonia Danusubroto dan Febby Mutiara Nelson, 2023, Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda, *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2.
- Ayu Diah, Ni Nengah, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Program Kekhususan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Dwi Oktavia Ariyanti dan Nita Ariyani, 2020, Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, Issue 2.
- Fadhil Razez Sanjani, 2015, *Penerapan Justice collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Fidelis Bonatua Sihite, Tomson Situmeang, Edward M.L Panjaitan, dan Ika Darmika. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg). *Jurnal Hukum to-ra* Vol. 9, Issue 1.
- Fred Montanio, *Unintended victims of organized crime witness protection*, Criminal Justice Policy Review, Vol. 2, No. 4.
- General Assembly, *Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions*, 2 November 2020, A/55/383.
- Gerry Jordan, Ismansyah, dan Nani Mulyati, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Asas Keadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru), *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2.
- Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, Bayu Dwi Widdy Jatmiko. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 No.1.
- Kevin Lie, Aria Zurnetti, dan Edita Elda, 2023, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman dalam Pembangun Properti di Kota Padang, *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 2.
- Khadam, K. 2022, Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian di Persidangan, *Jurnal Juristic*, Vol. 3 No. 03.
- Lilik Mulyadi, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Kejahatan Terorganisasi dan kejahatan oleh Organisasi*, (Suatu Tinjauan dari Segi Kriminologi), Jurnal Polisi Indonesia.
- Mar'ie Mahfudz Harahap dan Rezki Anwar, 2022, Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian *Justice collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu, *Progresif: Jurnal Hukum XVI*/No. 1.
- Mas Achmad Santosa, 2011, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, Jakarta.

- M. Arief Amrullah, Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 22.
- Moch. Fahmi Abdillah dan Hariyo Sulistiyantoro, 2023, Perlindungan Hukum *Justice collaborator* pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Sidoarjo, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No. 3
- Muhammad Iqbal Lubis et al. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* dalam Hukum Pidana di Indonesia, Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2223K/Pid.Sus/2012. *USU Law Journal*, Vol. 7, No. 3.
- Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, 2023, Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang sebagai *Justice collaborator* di Indonesia, *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Nyimas Maharani Putri Pertiwi dan Zainudin Hasan. 2022. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan *Justice collaborator* terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Muhammadiyah Law Review*, Vol 9 (1).
- Setiyono, Sugeng Supartono, dkk, 2023, Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Aspek Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, Vol. 1 No. 2.
- Supriyadi Widodo Ediyono. 2011. Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama, *Jurnal LPSK* Vol. ke I, No.1.
- Supriyadi Widodo Eddy. 2011. Prospek Perlindungan *Justice collaborator* di Indonesia Perbandingannya di Amerika dan Eropa, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Vol. 1 No. 1.
- Tavip Dwiyaatmiko, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Yang Dituntut Dan Diperiksa Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univ. Islam Jakarta, Jakarta.
- Yuni Priskila Ginting, Anwar Takeshi Oni, dkk, 2023, Sosialisasi Pembuktian Saksi Mahkota dan *Justice collaborator* dalam Pidana Pembunuhan, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 10.
- Z. Asikin Kusumah Atmadja, "Politik Hukum Nasional" dalam *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*, ed. Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Nasroen Yasabari, Bandung : Alumni, 1980.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Tanggal 14 Desember 2011.
United Nations Convention Against Corruption.
United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Fadilla Kurnia Putri. 2024. Tesis: “Kedudukan *Justice collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
Januarso Rahardjo. Tesis: “Perlindungan Hukum *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
M. Ali Murtadho. 2018. Skripsi: “Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

E. INTERNET

ICJR, 2016, *Problem dalam Implementasi bagi Justice collaborator (JC) Indonesia Masih Ditemukan*, Source URL: <https://icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-indonesia-masih-ditemukan/>.
Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 Pukul 19.21 WIB.